

**ANALISIS PENGARUH PDRB, TENAGA KERJA, SEKTOR
PERTANIAN DAN *NATURAL RESOURCES* TERHADAP KAPASITAS
FISKAL DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA 2019**

(Skripsi)

Oleh

**DONI ARDIANSYAH
NPM 1711021037**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GRDP, LABOR, AGRICULTURAL SECTOR AND NATURAL RESOURCES ON FISCAL CAPACITY OF DISTRICT/CITY REGIONS IN SUMATRA IN 2019

By

DONI ARDIANSYAH

One of the successes of a country is the creation of good quality development in each region. Regional autonomy is a good opportunity for local governments to prove the ability of local governments to carry out the authority that is the right of the region. The potential financial capacity of a region cannot be separated from the factors of regional prosperity and economic growth. The purpose of this study was to determine the analysis of how the influence of GDP, labor, the agricultural sector and Natural Resources on the fiscal capacity of districts/cities in Sumatra. The analytical method used in this research is multiple regression analysis. Tests using statistical tests include t-test, F-test and R-square (coefficient of determination) as well as classical assumption test. Where all these tests use the Eviews 10 program tool with Crossectoin data for 154 districts/cities in Sumatra sourced from the Central Statistics Agency. The results of the analysis show that GRDP, labor, the agricultural sector and Natural Resources have a positive and significant influence on the Fiscal Capacity of Districts/Cities in Sumatra 2019.

Keywords : GRDP, Labor, Agricultural Sector, Natural Resources, Regional Fiscal Capacity.

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH PDRB, TENAGA KERJA, SEKTOR PERTANIAN DAN *NATURAL RESOURCES* TERHADAP KAPASITAS FISKAL DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA 2019

Oleh

DONI ARDIANSYAH

Salah satu keberhasilan suatu negara adalah terciptanya kualitas pembangunan yang baik di masing-masing wilayah. Otonomi daerah menjadi kesempatan yang baik untuk pemerintah daerah untuk pembuktian kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan kewenangannya yang menjadi hak daerah. Potensi kemampuan keuangan suatu daerah tidak bisa terlepas dari faktor kesejahteraan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Penelitian ini tujuannya melihat analisis bagaimana pengaruh PDRB, tenaga kerja, sektor pertanian dan *Natural Resources* terhadap kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Sumatera. Metode analisis untuk menganalisis yaitu analisis regresi berganda. Pengujian memanfaatkan Uji statistik mencakup uji t, uji F dan R-square (koefisien determinasi) serta uji asumsi klasik. Di mana seluruh uji itu dibantu dengan alat program Eviews 10 dengan data Crossectoin 154 kabupaten/kota di Sumatera yang berasal dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian membuktikan PDRB, tenaga kerja, sektor pertanian dan *Natural Resources* memengaruhi positif dan signifikan terhadap Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera 2019.

Kata kunci : PDRB, Tenaga Kerja, Sektor Pertanian, *Natural Resources*, Kapasitas Fiskal Daerah.

**ANALISIS PENGARUH PDRB, TENAGA KERJA, SEKTOR
PERTANIAN DAN *NATURAL RESOURCES* TERHADAP KAPASITAS
FISKAL DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA 2019**

Oleh

DONI ARDIANSYAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PENGARUH PDRB, TENAGA
KERJA, SEKTOR PERTANIAN DAN
NATURAL RESOURCES TERHADAP
KAPASITAS FISKAL DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA 2019**

Nama Mahasiswa

: **Doni Ardiansyah**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1711021037

Program Studi

: **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas

: **Ekonomi dan Bisnis**



MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M.
NIP 19800705 200604 2 002

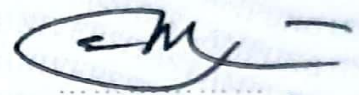
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

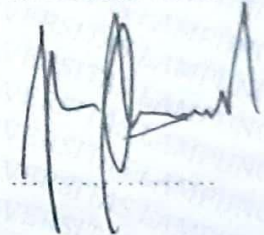
Ketua : **Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.**



Penguji I : **Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**

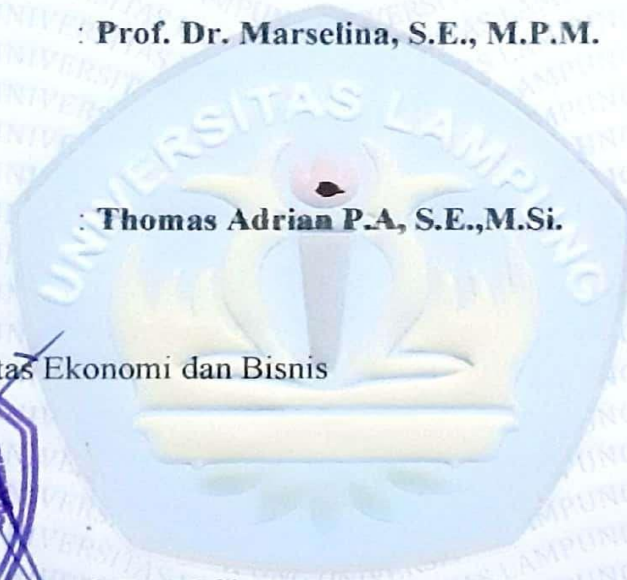


Penguji II : **Thomas Adrian P.A, S.E.,M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nafrobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh – sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima konsekuensi/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Bandar Lampung, 12 Februari 2024
Penulis



Doni Ardiansyah

RIWAYAT HIDUP

“Penulis dilahirkan di Tejosari, Kota Metro pada tanggal 24 April 1999, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari Bapak Bambang Sukardi dan Ibu Suripti. Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu Taman Kanak-kanak (TK) PKK Tejosari diselesaikan tahun 2004, Sekolah Dasar (SD) Negeri 8 Metro diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Metro diselesaikan tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Metro diselesaikan tahun 2017. Adapun ekstrakurikuler yang diikuti yaitu Basket dan Pencinta Alam.

Tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung di jurusan Ekonomi Pembangunan melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Kegiatan organisasi yang pernah diikuti yaitu sebagai Ketua Rohis FEB Unila dan Sekretaris Jenderal Bina Rohani Islam Mahasiswa (BIROHMAH) Universitas Lampung. Pada tahun 2017 dan tahun 2019, penulis menjuarai Program Mahasiswa Wirausaha Universitas Lampung dengan produk olahan keripik pare. Pada tahun 2019 penulis mengadakan kegiatan kerjasama bersama Mahepel untuk mendukung program *zero waste* yang digalakkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan membagikan tumbler/botol minum gratis ke seluruh mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2018.

Pada tahun 2019 penulis mengikuti kegiatan KKL (Kuliah Kunjung Lapangan) di Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, Museum Bank Indonesia, dan Studio Mata Najwa. Pada tahun 2020 penulis melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Margoyoso, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari. Pada tahun 2021 penulis bekerja di Istitut Perdesaan Indonesia selama 1 tahun dan sekaligus bekerja sebagai marketing area beras Cimadani Pulen di Bandar Lampung. Pada tahun 2022 penulis bekerja di salah satu perusahaan jasa yang bergerak dibidang *corporate strategic partner* yaitu di Himpunan Pengusaha Garuda Putih sampai sekarang.

PERSEMBAHAN

“Alhamdulillah Robbil ‘Alamin puji syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW, serta berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Penulis persembahkan karya sederhana ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kepada:

Kedua orang tua penulis yang terhormat, terimakasih untuk Bapak Bambang Sukardi dan Ibu Suripti. Terima kasih atas segala kasih sayang yang tak terhingga, atas pengorbanan, dan perjuangannya yang luar biasa sebagai sosok inspirasi dalam hidup, serta atas doa yang selalu di langitkan di setiap langkah perjuanganku.

Keluarga besar, sahabat, dan rekan-rekan, terimakasih telah membantu dalam proses perkuliahan ku.

Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan motivasi, arahan, dan pelajaran yang luar biasa serta sangat membangun dalam proses perkuliahan dan penyelesaian karya tulis ini. Serta Almamater tercinta Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.”

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.”

(QS. Aali ‘Imraan : 139)

SANWACANA

“Alhamdulillah Robbil ‘Alamin puji syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW, serta berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Sektor Pertanian Dan *Natural Resources* Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera 2019” merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran dan perhatian serta, memberikan arahan, ilmu, dan saran yang membangun kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan.

4. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat, bimbingan, dan arahan kepada penulis sejak semester awal hingga selesai.
5. Ibu Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M. selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan saran, arahan, dan tambahan ilmu dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Thomas Adrian P.A, S.E.,M.Si. selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan saran, arahan, dan tambahan ilmu dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan: Prof. S.S.P. Pandjaitan, Pak Nairobi, Pak Heru, Pak Yoke, Pak Muhidin, Prof. Toto, Pak Wayan, Pak Ambya, Pak Husaini, Pak Imam, Pak Yudha, Pak Moneyzar, Pak Thomas, Pak Arif, Pak Dedi, Ibu Betty, Ibu Irma, Ibu Emi, Ibu Marselina, Ibu Neli, Ibu Ida, Ibu Ratih, Ibu Asih, Ibu Zulfa, serta seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat bermanfaat selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
8. Ibu Mimi, Pak Kasim dan seluruh staff dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas seluruh bantuan yang selama ini diberikan kepada penulis.
9. Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Suparjo dan Ibu Sritanti yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis, terima kasih atas segala perjuangannya, kasih sayang yang luar biasa, serta nasihat yang selalu

mengiringi segala ikhtiar penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah swt.

10. Alm Kakek Bakri, dan Nenek Gini, Bibi Makin, Paman Halimi, Adikku Danar Bagas Alfiyan, Sepupuku Azriel, Paman Dedi, Paman Yuli, dan Ustadz Bagus, Ustadz Agung, Kak Seta, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.
11. Keluarga Kuliah Kerja Nyata (KKN), Bapak Ali Imam beserta keluarga, Angga, Amran, Selvi, Katrin terima kasih sudah memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis.
12. Sahabat dan teman-teman tercinta Pebri , Eko, Endri, Abdih, Nida, Vellya, Duwi, Sari, Karina, Nirmala, Rahayu, Findy, Ages, Qurrota, Siti Istikomah, Indah Laras, dan Serli. Terima kasih sudah saling mengingatkan, membantu, dan berjuang bersama.
13. Teman seperjuangan Ekonomi Publik 2017 yang luar biasa, terimakasih telah berjuang bersama selama proses perkuliahan.
14. Keluarga Jurusan Ekonomi Pembangunan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kekompakkan dan kekeluargaannya.
15. Keluarga ROIS FEB, Doni, Vellya, Bambang, Duwi, Indah, Abdih, Afif, Ages, Eka, Eko, Fina, Ghaiby, Hafizd, Naqon, Qurrota, Rahayu, Ratih, Riski, Robby, Wulan, Chaniado, Arifin, dan Deni. Terimakasih sudah kebersamaan dalam berorganisasi dan pengalaman luar biasa, serta saling menguatkan dalam berdakwah.

16. Keluarga BIROHMAH Universitas Lampung, Irvan, Nida, Doni, Syarif, Indah, Cindy, Dandi, Faris, Ghaiby, Handrian, Imad, Livia, Rohadi, Imam, Neng, Qurrota, Rini, Salma, Usamah, Vellya, Widia, dan Yuyun. Terimakasih sudah kebersamai dalam berorganisasi dan pengalaman luar biasa, serta saling menguatkan dalam berdakwah.
17. Teman – teman seperjuangan aktivis dakwah kampus yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas kekeluargaanya, dan perjuangannya selama ini dalam kebersamai selama proses perkuliahan dan dalam berdakwah.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini selesai. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, saran dan kritik untuk pengembangan lebih lanjut sangatlah diharapkan penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga segala bantuan, bimbingan, dukungan, dan do'a yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin.”

Bandar Lampung, 12 Februari 2024

Doni Ardiansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Teoritis	11
2.1.1 Teori Kapasitas Fiskal.....	11
2.1.2 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal	13
2.1.3 Kapasitas Fiskal Daerah.....	14
2.1.3.1 Pendapatan Asli Daerah	14
2.1.3.2 Dana Bagi Hasil	15
2.1.5 Tenaga Kerja	19
2.1.6 Sektor Pertanian	20
2.1.7 Natural Resources	21
2.2 Tinjauan Empiris.....	23
2.3 Kerangka Pemikiran.....	27

2.4	Hipotesis.....	29
III.	METODE PENELITIAN	30
3.1	Jenis Penelitian.....	30
3.2	Populasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.3	Data dan Sumber Data	30
3.4	Definisi Operasional Variabel.....	31
3.4.1	Kapasitas Fiskal Daerah.....	31
3.4.2	Produk Domestik Regional Bruto	32
3.4.3	Tenaga Kerja	33
3.4.4	Sektor Pertanian	33
3.4.5	Natural Resources	33
3.5	Metode Analisis Data.....	34
3.5.1	Uji Asumsi Klasik	35
3.5.1.1	Uji Normalitas	35
3.5.1.2	Uji Heteroskedastisitas	35
3.5.1.3	Deteksi Multikolinieritas	36
3.5.2	Pengujian Hipotesis.....	37
3.5.2.1	Uji t.....	37
3.5.2.2	Uji F.....	38
3.5.2.3	Pengujian Koefisien Determinasi	39
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1	Analisis Statistik Deskriptif	40
4.2	Hasil Uji Regresi Data Panel.....	41
4.2.1	Uji Asumsi Klasik	41

4.2.2	Hasil Estimasi Regresi	43
4.2.3	Pengujian Hipotesis.....	43
4.2.3.1	Uji t-Statistik	43
4.2.3.2	Uji F-Statistik	44
4.2.3.3	Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	44
4.2.4	Pembahasan Hasil Penelitian	45
V.	SIMPULAN DAN SARAN	49
5.1	Simpulan	49
5.2	Saran.....	50
	DAFTAR PUSTAKA	51
	LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Rasio PAD dan Dana Perimbangan	5
Tabel 2. Potensi Perekonomian Daerah di Sumatera 2019	7
Tabel 3. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi di Sumatera 2019.....	8
Tabel 4. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi di Pulau Jawa 2019.....	8
Tabel 5. Tinjauan Empiris.....	23
Tabel 6. Variabel Penelitian.....	31
Tabel 7. Durbin Watson	36
Tabel 8. Statistik Deskriptif	40
Tabel 9. Uji Heteroskedestisitas.....	41
Tabel 10. Deteksi Multikolinieritas.....	42
Tabel 11. Uji t-Statistik.....	43
Tabel 12. Uji F	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	28

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara yang berhasil salah satunya dikarenakan terciptanya kualitas pembangunan yang baik di masing-masing wilayah. Isu pembangunan yang berkembang saat ini adalah isu pembangunan daerah. Artinya keberhasilan pembangunan nasional diukur dari keberhasilan pembangunan yang dilakukan di setiap wilayah. Pembangunan ekonomi daerah yaitu sebuah kerjasama masyarakat dengan pemerintah daerahnya untuk pengelolaan sumber daya yang ada dan pembentukan mitra dengan bidang swasta agar terciptanya lapangan kerja yang banyak dan bisa mendorong aktivitas perekonomian agar semakin tumbuh dan berkembang di daerah itu. Pembangunan perekonomian daerah ini menjadi bentuk upaya dalam mengembangkan taraf hidup yang dilihat berdasarkan tingkat pendapatan riil per kapita agar terjadi peningkatan dalam produktivitas.

Usaha untuk membangun perekonomian daerah ini bertujuan menambah jumlah dan jenis kesempatan kerja di penduduk setempat. Agar tujuan tersebut dapat terealisasi, pemerintah dan penduduk perlu bekerjasama untuk menjalankan pembangunan daerahnya. Berdasarkan tujuan itu, penduduk dan pemerintah daerahnya diharuskan dapat membuat perkiraan dari peluang di masing-masing sumber daya yang dibutuhkan untuk menyusun dan mengembangkan ekonomi daerah. Permasalahan daerah seperti tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran dipengaruhi kinerja pembangunan di tingkat daerah. Apabila pemerintah daerah dapat menggunakan sumber daya yang asalnya dari pemerintah pusat atau daerah, maka berbagai indikator pembangunan daerah mampu dijalankan dengan sempurna.

Otonomi daerah yang dilaksanakan menjadi sebuah fokus utama dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat. Di setiap wilayah yang dikembangkan dapat disesuaikan pemerintah daerah berdasarkan peluang dan ciri khas setiap daerahnya. UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwasannya pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur segala permasalahan pemerintahan atas asas otonomi dan tugas pembantuannya. Berdasarkan peraturan itu, pemerintah daerah diharapkan bisa mengatur sendiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat dari segi biaya ataupun dana yang dikelolanya. Baiknya keuangan daerah yang dikelola memiliki pengaruh pada kesuksesan sebuah wilayah (Puspitasari dkk, 2015).

Otonomi Daerah dapat dijadikan peluang yang tepat untuk pemerintah daerah dalam pembuktian kesanggupannya menjalankan wewenangnya yang menjadi hak daerah. Mengelola dana yang baik dinilai dari kinerja keuangannya. Kinerja keuangan yaitu sebuah ukuran kinerja dalam sebuah perusahaan dengan indikator keuangan. Di masa desentralisasi yaitu wewenang yang diserahkan pemerintah pusat ke daerah ini menjadikan mereka berwenang untuk membangun daerahnya. Pembangunan fiskal menjadi suatu usaha untuk mengembangkan layanan masyarakat pemerintah daerah.

Pembangunan daerah bisa berbentuk pembangunan fiskal yang bisa mengembangkan sarana serta infrastruktur di daerahnya. Kelola keuangan daerah ini menjadi peranan utama untuk tercapainya tujuan pembangunan dan penduduk yang sejahtera, apalagi otonomi daerah ini sudah dijalankan selama dua dekade. Selama waktu itu, banyak daerah yang terlihat semakin sejahtera dari sebelumnya, akan tetapi tidak sedikit juga daerah yang masih kesulitan dalam menyesuaikan pembangunan di masa otonom ini. Kemunduran pembangunan selalu berkaitan dengan kekurangan kreativitas daerah dalam melihat potensi keuangannya di daerah tersebut.

Keefektifan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dimulai dari 2001 menjadi proses yang baik untuk Indonesia dalam mendorong masa globalisasi ekonomi dengan cara menguatkan ekonomi daerah. Konsekuensi yang didapat yaitu pemberian kewenangan disertai alokasi dana dan ketersediaan barang publik ke pemerintah daerah. Sebuah daerah yang bisa menjalankan otonomi dan desentralisasi terlihat dari kesanggupan keuangan daerahnya, yang berarti daerah mempunyai wewenang dan kesanggupan untuk menjadi sumber keuangan, melakukan pengelolaan dan memanfaatkan keuangannya sendiri dengan memadai dalam pembiayaan penyelenggara pemerintah dan mengurangi bergantung pada pemerintah pusat agar pendapatan daerahnya bisa menjadi bagian sumber keuangan paling besar dan semakin besar peran pemerintah daerahnya (Halim, 2009).

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak 2001 telah memberikan angin segar bagi pemerintah daerah dalam hal mengatur rumah tangga masing-masing daerah. Terutama sekali bagi pemerintah daerah yang mempunyai kekayaan alam potensial, akan menerima otonomi yang harapannya menjadi lebih baik di masa mendatang. Pemberian otonomi kepada masing-masing kabupaten atau kota tentunya menimbulkan cam dan hasil yang berbeda dalam memanfaatkan atau mengolah seluruh kekayaan yang dimiliki. Suatu daerah yang punya sumber daya alam didukung dengan keahlian mengolahnya, maka akan dapat menjadikan daerah tersebut lebih tumbuh dan berkembang. Sebaliknya jika kabupaten atau kota hanya berpangku tangan dan tidak bekerja keras dalam memanfaatkan potensi yang ada, maka pertumbuhan daerah akan sulit sekali untuk dicapai.

Menurut UU No 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pasal 28 ayat 3 Kapasitas fiskal Daerah menjadi sumber dana Daerah dari PAD dan Dana Bagi Hasil. Tumbuhnya perekonomian daerah atau meningkatnya PDRB menjadi suatu indikator utama untuk penentuan tingkat keberhasilan pembangunan daerah (Pramandari, 2014). Fenomena tersebut menunjukkan PDRB menjadi indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat daerah.

Dengan demikian, pemerintah daerah harus memanfaatkan kekuatan perekonomian penduduk agar memotivasi perkembangan perekonomian, daripada hanya menciptakan produk undang-undang yang berkalitan dengan pajak atau retribusi. Tingkatan sejahtera perekonomian penduduk di daerah dilihat dari pendapatan riil atau PDRB perkapita di daerahnya. Fenomena naiknya perkembangan perekonomian di sebuah daerah tidak berarti masing-masing wilayah mempunyai tingkatan pertumbuhan yang serupa, sebab adanya perbedaan sumber daya di setiap daerah.

Harrod-Domar memaparkan berdasarkan teori pertumbuhan bahwa jika melihat faktor modal, pengeluaran perkapita dan tumbuhnya perekonomian berhubungan positif yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat apabila pendapatan juga naik. Akan tetapi untuk melihat tumbuhnya perekonomian, tidak hanya dari pengeluaran perkapita. Tumbuhnya perekonomian harus dimulai dari daerahnya sendiri, sehingga output perkapita yang dikeluarkan tidak berasal dari bantuan yang banyak diterima, tetapi dari pengembangan sumber atau potensi daerahnya. Pada setiap daerah, output perkapita dimulai dari daerah itu bisa terlihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Potensi dari PAD yaitu besaran kekuatan dari sebuah daerah untuk menghasilkan pendapatan yang diterima. Meningkatnya pendapatan seorang individu akan menambah kesanggupan orang tersebut untuk membayar sejumlah tagihan dari pemerintah. Sama dengan hal untuk tingkatan yang tetap dalam distribusi pendapatan akan meningkatkan PDRB perkapita riil dalam daerah provinsi ataupun kabupaten, maka kesanggupan penduduk daerah dalam mengeluarkan biaya pemerintah semakin tinggi. Dengan demikian, tingginya PDRB per kapita riil sebuah daerah memengaruhi potensi sumber pendapatan daerah yang makin besar.

Tingginya PAD membuktikan daerah itu sudah menggunakan sumber yang ada dengan baik dan tepat. Sementara daerah dengan jumlah pendapatannya kurang, perlu memfokuskan diri dalam mencari sumber kekayaan dan potensi yang ada guna menaikkan tingkatan pendapatan daerah. PAD yang tinggi menggambarkan bahwa daerahnya memiliki kemandirian untuk membayar aktivitas dan pembangunan daerah (Retnoningsih, 2019). Berikut ini adalah rasio perbandingan antara PAD dengan Dana Perimbangan kabupaten/kota di Sumatera 2019.

Tabel 1. Rasio PAD dan Dana Perimbangan

No	Provinsi	PAD	Dana Perimbangan
1	Aceh	0,098567141	0,588583072
2	Sumatera Utara	0,134705642	0,642590719
3	Sumatera Barat	0,108909395	0,706429803
4	Riau	0,123330756	0,720268422
5	Jambi	0,086096626	0,708767334
6	Sumatera Selatan	0,11019003	0,681504075
7	Bengkulu	0,072662968	0,722938537
8	Lampung	0,095338783	0,658570138
9	Bangka Belitung	0,101662679	0,715554862
10	Kepulauan Riau	0,219303988	0,616057137
Rata-rata		0,115076801	0,67612641

Sumber : *Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera 2019*

Pada 2019 rerata rasio PAD dalam total pendapatan atau penerimaan daerah hanya sebesar 11,5% dan rata-rata dana perimbangan sebesar 67,6%. Hal tersebut membuktikan daerah yang memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat yang masih tinggi. Penurunan derajat kemandirian fiskal menunjukkan masih rendahnya tingkat kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, tumbuhnya perekonomian sebelum dan sesudah implemmentasi desentralisasi fiskal daerah dengan rendahnya kafis memiliki hal untuk memperoleh dana yang melebihi daerah dengan kafis kecil (Adi, 2005). Hal tersebut guna standar layanan publik bisa direalisasikan dan meminimalisir ketimpangan horizontal setiap daerah dan ketimpangan vertikal pada Pemerintah Pusat dan Daerah (Halim, 2001).

Otonomi daerah dilaksanakan guna mengembangkan layanan publik (*public service*) dan meningkatkan ekonomi daerah. Pada dasarnya ada 3 cara penting dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, di antaranya (Mardiasmo, 2002) :

1. Peningkatan mutu dan jumlah layanan publik serta penduduk sejahtera.
2. Penciptakan pengelolaan sumber daya daerah yang efektif dan efisien.
3. Melakukan pemberdayaan dan penciptaan ruang untuk penduduk agar ikut serta pada proses pembangunan.

Untuk melaksanakan desentralisasi, peranan transfer tak bisa terhindarkan jika melihat otonomi yang wajib diselesaikan pemerintah daerah untuk kepentingan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Berlandaskan UU No 33 Tahun 2004 perihal Perimbangan Keuangan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dengan Keuangan Pemerintahan Daerah pasal 28 ayat 3 Kapasitas Fiskal Daerah menjadi asal dana Daerah dari PAD serta Dana Bagi Hasil. Tumbuhnya perekonomian atau PDRB yang meningkat menjadi unsur utama dalam menetapkan tingkatan keberhasilan daerah (Pramandari, 2014). Fenomena tersebut menunjukkan PDRB bisa disebut menjadi unsur yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Tingginya PDRB sebuah daerah dapat menggambarkan tingkatan penduduk sejahtera yang baik. Dengan demikian, akan memengaruhi realisasi penerimaan pemerintah daerah yang baik dan daerah dengan perkembangan perekonomian yang baik berpeluang tinggi untuk memperoleh kenaikan PAD (Desmawati dkk, 2015). Dengan demikian, pemerintah daerah harus melakukan perdayaan kekuatan ekonomi masyarakat agar memotivasi tumbuhnya perekonomian daripada hanya sekadar menciptakan produk aturan yang berkaitan dengan pajak atau retribusi. Pertumbuhan perekonomian yang tinggi di sebuah daerah tidak memiliki arti setiap daerah mempunyai tingkatan pertumbuhan yang serupa sebab adanya perbedaan dalam sumber dayanya. Di bawah ini yaitu data potensi ekonomi pulau Sumatera 2019.

Tabel 2. Potensi Perekonomian Daerah di Sumatera 2019

No	Provinsi	Kapasitas Fiskal Daerah (Juta Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)	Tenaga Kerja	Sektor Pertanian (%)	Natural Resources
1	Aceh	13177	164769	1006799	30,37	12
2	Sumatera Utara	19990	807206	6681159	32,24	11
3	Sumatera Barat	11838	246237	2457554	24,01	10
4	Riau	6569	776647	2996079	28,53	11
5	Jambi	5372	212052	1649976	32,47	9
6	Sumatera Seatan	12032	464970	4010287	21,49	13
7	Bengkulu	4906	72102	981095	35,89	5
8	Lampung	8575	360846	4222740	33,14	6
9	Bangka Belitung	4402	76383	715927	18,35	7
10	Kepulauan Riau	2604	263015	935682	8,82	3

Sumber: BPS, diolah.

Pulau Sumatera adalah salah satu wilayah yang memiliki 10 provinsi dan terdiri dari 154 kabupaten/kota di dalamnya. Pulau Sumatera berperan penting dalam pembangunan di Indonesia. Pada tahun 2019 Sumatera merupakan wilayah dengan total PDRB terbesar ke 2 di Indonesia yaitu mencapai 3.434 Milyar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu banyaknya penambahan bruto di semua produk atau jasa yang diciptakan di daerah setempat sebuah negara yang muncul karena sejumlah kegiatan perekonomian dengan kurun waktu tertentu. Pada tahun 2019 Sumatera juga memiliki jumlah penduduk yang sudah bekerja dengan total 25.657.298 jiwa. Tenaga kerja yaitu suatu faktor produksi yang dimanfaatkan untuk proses produksi dan menjadi faktor utama untuk tumbuhnya perekonomian. Saat pekerja ikut serta pada proses produksi, tenaga kerja mendapat upah yang menjadi bayaran dari pekerjaannya yang sudah diselesaikan (Taryoko, 2016).

Pada tahun 2019 rasio sektor pertanian terhadap PDRB yang ada di pulau Sumatera rata-rata 28,05%. Tentu saja kondisi struktur ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap potensi keuangan suatu daerah. Pada tahun 2019 jumlah wilayah pertambangan atau *natural resources* khususnya pertambangan mineral dan migas yang ada di pulau Sumatera berjumlah 87 wilayah tambang pertambangan mineral dan migas.

Tabel 3. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi di Sumatera 2019

No	Provinsi	IKFD
1	Aceh	0,529
2	Sumatera Utara	0,945
3	Sumatera Barat	0,455
4	Riau	0,956
5	Jambi	0,35
6	Sumatera Selatan	0,794
7	Bengkulu	0,319
8	Lampung	0,59
9	Bangka Belitung	0,264
10	Kepulauan Riau	0,389
Rata-rata		0,5591

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK.07 /2019

Tabel 4. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi di Pulau Jawa 2019

No	Provinsi	IKFD
1	DKI Jakarta	11,473
2	Jawa Barat	3,171
3	Jawa Tengah	1,948
4	Yogyakarta	0,314
5	Jawa Timur	2,589
6	Banten	1,135
Rata-rata		3,386

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK.07 /2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 126/PMK.07 /2019 rata-rata indeks kapasitas fiskal daerah Sumatera lebih kecil yaitu 0,55 daripada indeks kapasitas fiskal daerah Jawa yang mencapai 3,38. Kondisi ini tentu menegaskan bahwa Sumatera masih jauh lebih rendah kemampuan keuangannya jika dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah Jawa. Berdasarkan realitas dalam daerah kabupaten/kota di Sumatera berpotensi dalam meningkatnya kemampuan keuangan daerahnya melalui sumber daya dan faktor-faktor yang ada. Dengan kata lain kabupaten/kota yang ada di Sumatera perlu dapat menambah jumlah fiskal guna bisa dijadikan pengembangan diri dalam membuat sebuah pola kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Potensi kesanggupan keuangan sebuah daerah tidak terlepas dari faktor kesejahteraan dan pertumbuhan

perekonomian daerah. Sedangkan seberapa cepat lajunya pertumbuhan perekonomian daerah tidak terpisah dari faktor keadaan struktur perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi realitas itu maka untuk mengukur peranan faktor-faktor yang ada perlu adanya pengujian empiris dengan data terbaru tentang bagaimana pengaruh PDRB, tenaga kerja, sektor pertanian dan Natural Resources pada kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Sumatera 2019 .

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang dikaji dan diteliti di antaranya:

- 1.2.1 Apakah PDRB memengaruhi kapasitas fiskal daerah di Sumatera.
- 1.2.2 Apakah jumlah tenaga kerja memengaruhi kapasitas fiskal daerah di Sumatera.
- 1.2.3 Apakah sektor pertanian memengaruhi kapasitas fiskal daerah di Sumatera.
- 1.2.4 Apakah *natural resources* memengaruhi kapasitas fiskal daerah di Sumatera.

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh PDRB pada kapasitas fiskal daerah di Sumatera.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja pada kapasitas fiskal daerah di Sumatera.
- 1.3.3 Untuk mengetahui pengaruh sektor pertanian pada kapasitas fiskal daerah di Sumatera.
- 1.3.4 Untuk mengetahui pengaruh *natural resources* pada kapasitas fiskal daerah di Sumatera.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di kemudian hari mampu berkontribusi:

1.4.1 Bagi Pemerintah

Riset ini diharapkan bisa dijadikan rujukan atau pertimbangan dalam menetapkan aturan tentang peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah di Sumatera.

1.4.2 Bagi Akademisi

Riset ini diharapkan bisa meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan bagi para akademisi tentang bagaimana pengaruh PDRB, tenaga kerja, sektor pertanian dan *natural resources* pada kapasitas fiskal daerah di Sumatera serta menjadi salah satu referensi dalam melaksanakan penelitian berikutnya.

1.4.3 Bagi Masyarakat

Riset ini diharapkan bisa menjadi penambah khasanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan sebagai referensi dalam mengkritisi kebijakan tentang Kapasitas Fiskal Daerah di Sumatera.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Kapasitas Fiskal

Teori Federalisme Fiskal diciptakan Hayek, Oates dan Musgrave. Teori ini menekankan tumbuhnya perekonomian dapat terjadi dengan medesentralisasi yakni mendelegasi kewenangan dari pusat ke daerah guna mengelola daerah mereka atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi ini dapat menambah tumbuhnya perekonomian dan penduduk yang sejahtera (Oates, 1972). Hal tersebut disebabkan produksi dan persediaan barang masyarakat lebih efektif dari pemerintah daerah. Mengambil keputusan pemerintah kota lebih ditanggapi dalam melakukan keanekaragaman pilihan daerah yang bermanfaat dalam efektivitas alokasi. Terdapat 2 pandangan dalam teori mengenai dampak perekonomian dari implementasi desentralisasi, yaitu teori perespektif baru (teori generasi ke dua) dan *traditional theories (first generation theory)*.

2.1.1.1 Teori Tradisional atau Teori Generasi Pertama

Teori tradisional adalah teori yang menonjolkan tujuan diadakannya desentralisasi, yakni memberi *allocative efficiency* dan membuat persaingan. Teori yang dikembangkan Hayek pada tahun 1945 memaparkan untuk proses mengambil keputusan yang desentralisasi makin mudah dengan menggunakan informasi secara efektif sebab hubungan pemerintah daerah dan penduduknya dekat. Teori kedua dikemukakan oleh Tiebout pada tahun 1956 memaparkan adanya persaingan setiap pemerintah daerah mengenai alokasi pengeluaran publik dan adanya kemungkinan penduduk menentukan barang atau jasa yang sesuai dengan minatnya. Teori lainnya dikemukakan oleh Musgrave pada tahun 1959 memaparkan bahwa *revenue and expenditure assignment* penting diantara

tingkatan pemerintah yang tujuannya menaikkan tingkat penduduk yang sejahtera..

2.1.1.2 *Second Generation Theory*

Teori *Second Generation* menyebut adanya perubahan sikap pemerintah daerah jika adanya implementasi desentralisasi fiskal saat pemerintah pusat memberikan wewenangnya ke pemerintah, yakni secara mandiri mengembangkan pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan penduduk.

2.1.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (2002), mendefinisikan pertumbuhan perekonomian yaitu aktivitas ekonomi yang mengakibatkan produk dan jasa yang di produksi naik dalam aktivitas perekonomian penduduk, pertumbuhan berhubungan dengan berkembangnya dimensi tunggal yang dihitung dari naiknya hasil produksi dan pendapatan. Todaro dan Smith (2006) menyebut pertumbuhan perekonomian yaitu sebuah proses meningkatkan kapasitas produktif pada sebuah ekonomi dengan berkelanjutan dari waktu ke waktu dan dapat memberikan hasil yang tinggi dalam pendapatan dan output. Solow dan Swan menyebut pertumbuhan ekonomi bergantung dari ketersediaan faktor produksi seperti masyarakat, pekerja dan akumulasi modal. Model ini seringkali disebut model perkembangan neoklasik (Mankiw, 2003). Rumus dasar dalam model pertumbuhannya yaitu:

$$Y = f (K,L)$$

Di mana:

Y = Output

K = Kapital

L = Angkatan kerja.

Bedasarkan teori perkembangan neoklasik, berkembang output seringkali berasal dari salah satu faktor, di antaranya naiknya mutu dan jumlah pekerja, penambahan modal serta penyempurnaan teknologi.

2.1.2 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

UU No.32 Tahun 2004 mendefinisikan hak kekuasaan otonomi daerah yaitu hak kekuasaan dan kewajiban daerah untuk mengelola dan menjalankan urusannya pribadi serta kebutuhan penduduknya yang disesuaikan dengan aturan undang-undang. Terdapat 2 implikasi khusus dalam otonomi daerah yakni peningkatan dana ekonomi dan efektivitas serta efisiensi. Maka dari itu desentralisasi memerlukan biaya yang cukup untuk melaksanakan pembangunan daerahnya (Handayani 2009). Desentralisasi menjadi bentuk pengalihan hak kekuasaan serta wewenang, tanggungjawab, dan sumber daya (personel, biaya, dan sebagainya) dari pemerintah pusat ke daerah (Khusaini, 2006).

Desentralisasi menjadi pemberian wewenang pada sektor penerimaan anggaran ataupun keuangan secara administrasi atau pengaturan manfaatnya oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, suatu arti desentralisasi fiskal berbentuk pemberian wewenang dari segi keuangan atau beberapa sumber penerimaan ke daerah menjadi sebuah proses mengintensifikasi peran dan memberdayakan daerah untuk pembangunan. Desentralisasi fiskal membutuhkan pemindahan tanggungjawab akan pendapatan maupun pembelajaan ke pemerintah yang di bawah (Handayani, 2009). Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan bisa membangun kemandirian pemerintah daerah dari bidang keuangan daerahnya.

2.1.3 Kapasitas Fiskal Daerah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No. 126/PMK.07/2019 mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang dimaksud Kapasitas Fiskal Daerah yaitu kesanggupan dana setiap wilayah yang tergambar dari pendapatan daerahnya dikurang pendapatan penggunaan yang telah ditetapkan. Peta Kapasitas Fiskal Daerah diartikan penggambaran kesanggupan dana daerah yang diklasifikasikan dari indeks kapasitas fiskal daerah. IKFD atau indeks kapasitas fiskal daerah Kabupaten/Kota dihitung melalui perhitungan kapasitas fiskal setiap daerah dan wilayah dibagi rata-rata kapasitas fiskal semua daerah di Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan desentralisasi pada sektor keuangan atau dikatakan desentralisasi fiskal, terlihat bahwa adanya sejumlah masalah utama yang menarik perhatian, di antaranya kebutuhan dan kapasitas fiskal. Keperluan dan kapasitas fiskal merupakan hal utama untuk menghitung seberapa besar peralihan ke daerah (Litvack, 1999). UU No 33 tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 28 ayat 4 memaparkan kapasitas fiskal daerah yaitu dana yang bersumber dari PAD dan Dana Bagi Hasil.

2.1.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian PAD Yaitu pendapatan yang berasal dan didapatkan wilayah asalnya dari aturan daerah dan disesuaikan dengan aturan undang-undang. PAD mencakup mengelola pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang terpisah dari PAD lainnya. Untuk mengupayakan meningkatnya pendapatan daerah, pemerintah perlu meningkatkan sarana dan infrastrukturnya dalam layanan publik sebab hal tersebut bisa meningkatkan produktivitas penduduk dan kemudian investor akan tertarik dalam penanaman modalnya.

2.1.3.2 Dana Bagi Hasil

UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 menyatakan bahwa DBH adalah dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan dialokasi ke wilayah dengan jumlah persenan untuk mengelola keperluan serta kebutuhan daerah dalam melaksanakan tugas desentralisasi. Kebutuhan ini berasal dari pajak dan SDA. Unsur kebutuhan dana yang mengimbangi yaitu dana bagi hasil menjadi dengan perannya sebagai penyelenggara otonom daerah dikarenakan penerimaan itu berlandaskan potensi daerah yang menghasilkan sumber pendapatan daerah yang baik dan menjadi modal untuk pemerintah guna mendapat biaya untuk membangun dan pemenuhan belanja daerah yang tidak berasal dari PAD kecuali dana alokasi umum dan khusus. Maka dari itu, apabila pemerintah daerah ingin mentransfer bagi hasilnya tinggi, dengan demikian pemerintah diharuskan mengoptimalkan potensi pajak dan SDA yang telah ada di setiap daerah, sehingga adanya peningkatan dalam kontribusi memberikan dana bagi hasil ke pendapatan daerah.

Berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 126/PMK.07/2019 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang dimaksud Kapasitas Fiskal Daerah yaitu kesanggupan dana dari setiap daerah yang tergambar dari pengurangan pendapatan daerah oleh pendapatan pengguna yang telah ditetapkan dan belanjaan tertentu.

1. Pendapatan yang dimaksudkan mencakup:
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - b. Dana Perimbangan
 - c. Lainnya yang valid
2. Pendapatan yang pemakaiannya telah ditetapkan tersebut mencakup:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
 - b. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
 - c. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi
 - d. Dana Alokasi Khusus Fisik
 - e. Dana Alokasi Khusus Nonfisik
 - f. Dana Otonomi Khusus

- g. Dana Desa
- 3. Dana Alokasi Khusus Nonfisik berbeda dengan Dana Tunjangan Guru PNS Daerah dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah.
- 4. Belanja tertentu mencakup:
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Bunga
 - c. Belanja Hibah untuk Daerah Otonom Baru
 - d. Belanja Bagi Hasil
 - e. Alokasi Dana Desa

Dalam pengembangan dan praktik mengimplementasikannya, ada sejumlah pemakaian data kapasitas fiskal dengan metode perhitungan dan digunakan dengan cara yang tidak sama. Ada 5 pendekatan perhitungan, yaitu:

1. Kapasitas Fiskal merupakan dasar alokasi DAU yang ada pada Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dana Alokasi Umum yaitu dana yang berasal dari pendapatan APBN bertujuan meratakan kemampuan keuangan setiap daerah dalam membiayai keperluan daeran untuk melaksanakan Desentralisasi Fiskal.
2. Kesanggupan Keuangan Daerah dalam memperhitungkan Dana Alokasi Khusus tercantum pada Pasal 40 Ayat 2 UU Nomor 33 Tahun 2004 dan pemaparannya. Aturan itu ditegaskan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
3. Kesanggupan Fiskal Daerah yang dimanfaatkan untuk merencanakan pembiayaan keperluan bersama dalam menanggulangi kemiskinan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang sudah diperbaharui dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pada 2012 sudah ditentukan PMK Nomor 66/PMK.07/2011 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012.

4. Selain itu, adapula kesanggupan keuangan daerah yang disahkan Mendagri untuk dasar menghitung tunjangan keuangan anggota DPRD.
5. Kapasitas Fiskal Wilayah yang dimanfaatkan untuk Pinjaman dan Hibah Daerah berdasarkan PP No 30 Tahun 2011 mengenai Pinjaman Daerah dan PP Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Hibah Daerah.

Sejumlah aturan Kapasitas Fiskal tersebut menjadi latar belakang dalam membuat instrumen Peta Kapasitas Fiskal Daerah menjadi bagian dari implementasi aturan yang disesuaikan dengan keperluan Peta Kafisnya, dengan demikian ada bermacam-macam definisi Peta Kafis yang disesuaikan dengan maksud dari penggunaannya yang tidak sama.

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto yaitu banyaknya nilai tambah pruto yang muncul dari semua bidang ekonomi di sebuah daerah. Nilai tambah yakni penambahan nilai dari campuran unsur produksi dan bahan baku untuk memproses produksi. Nilai tambah dihitung dengan cara nilai produksi dikurang biaya antar. Nilai tambah ini mencakup indikator pendapatan (keuntungan, sewa tanah, bunga, gaji atau upah), penyusutan dan pajak tidak langsung. Produk Domestik Regional Bruto didapatkan dari penjumlahan nilai bruto dari setiap bidang dan penjumlahan nilai tambah bruto dari semua bidang itu. Berdasarkan BPS angka PDRB didapatkan dengan 3 pendekatan yakni pengeluaran, pendapatan dan produksi.

2.1.4.1 Menurut Pendekatan Produksi

Pengertian PDRB yaitu penjumlahan atas nilai produk maupun jasa yang diperoleh sejumlah barang produksi yang ada di sebuah daerah dengan kurun waktu setahun. Penyajian unit itu diklasifikasikan ke dalam 9 bidang, yakni persewaan, keuangan, pengangkutan dan komunikasi, hotel dan restoran, perdagangan, bangunan, air bersih dan gas, listrik, industri pengolahan, penggalian dan pertambangan, pertanian, dan jasa perusahaan.

2.1.4.2 Menurut Pendekatan Pendapatan

Pengertian PDRB yaitu membalas jasa yang didapat dari faktor produksi yang berkontribusi untuk aktivitas produksi di sebuah daerah. Balas jasa faktor produksiyaitu keuntungan dan gaji, upah, sewa tanah, bunga modal, penghasilan sebelum potong pajak dan pajak langsung yang lain. Berdasarkan pengertian ini PDRB meliputi penurunan netto. Banyaknya keseluruhan komponen pendapatan masing-masing sektor dikatakan nilai tambah bruto sektoral. Maka dari itu, PDRB yaitu banyaknya nilai tambah bruto semua bidang.

2.1.4.3 Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB yaitu penambahan seluruh unsur permintaan akhir yakni:

- a. Pengeluaran penggunaan rumah tangga dan organisasi swasta yang tidak memperoleh keuntungan.
- b. pemakaian pemerintah.
- c. Membentuk modal tetap domestik bruto.
- d. Stok berubah.
- e. Ekspor netto.

Secara matematis penghitungan PDRB memnfaatkan metode pengeluaran berikut :

$$Y = C + I + G + (X-M) + Dstok$$

PDRB perkapita yaitu pendapatan regional dilakukan pembagian dengan angka masyarakat yang menempati wilayah itu. PDRB perkapita bisa dimanfaatkan untuk unsur yang bisa dilihat keberhasilannya dalam membangun ekonomi sebuah daerah. PDRB yaitu nilai nett produk dan jasa akhir yang dikeluarkan dari setiap aktivitas perekonomian di sebuah wilayah dalam kurun waktu tertentu (Sasana, 2006).

PDRB mampu memperlihatkan kesanggupan sebuah wilayah dalam mengolah SDA yang ada. Sedangkan PDRB perkapita terlihat dari perhitungan PDRB harga konstan dibagi banyaknya masyarakat di sebuah daerah. Rumus pendapatan per kapita yaitu:

$$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB}{\sum Penduduk}$$

Oleh sebabnya, besarnya PDRB yang berasal dari setiap wilayah memiliki ketergantungan pada potensi SDA dan faktor produksinya. Terbatasnya faktor itu mengakibatkan variasi jumlah PDRB di setiap daerah. PDRB Perkapita memengaruhi positif pada derajat kemadirian fiskal (Mirsan dkk , 2019).

2.1.5 Tenaga Kerja

UU RI No. 13 Tahun 2003 Mengenai Ketenagakerjaan yang dimaksud Tenaga kerja yaitu seseorang atau kelompok yang sanggup menyelesaikan tugasnya untuk menciptakan produk maupun jasa agar kebutuhan dirinya maupun penduduk terpenuhi. Tenaga kerja menjadi suatu faktor produksi yang dimanfaatkan untuk memproduksi dan menjadi unsur yang utama dalam tumbuhnya perekonomian. Saat tenaga kerja ikut serta dalam memproduksi, tenaga kerja akan mendapatkan upah yang menjadi pembayaran atas tugas yang sudah diselesaikannya (Taryoko, 2016).

2.1.5.1 Peranan Tenaga Kerja

Teori klasik menyebut bahwasannya manusia menjadi faktor produksi paling penting dalam penentuan kesejahteraan negara. Teori Klasik Adam Smith (1729-1790) menyatakan keefektifan pengalokasian SDM menjadi awal dari tumbuhnya perekonomian. Kemudian, mulai diperlukan akumulasi modal fisik guna pertumbuhan perekonomian terjaga. Oleh karena itu, tenaga kerja menjadi syarat yang penting untuk tumbuhnya perekonomian dalam mengerjakan aktivitas produksi. Tenaga kerja harus terampil dan ahli dalam bidangnya. Kualitas tenaga kerja yang tinggi bisa memengaruhi produktivitas dan produksi yang baik agar meningkatnya laju tumbuhnya perekonomian.

2.1.6 Sektor Pertanian

PDRB sektor pertanian yaitu suatu pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki peranan utama untuk membangun perekonomian negara. Setidaknya ada 5 peran, di antaranya peran langsung untuk penyediaan kebutuhan penduduk, membentuk pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan mencari pekerja di pedesaan. Maka dari itu bidang pertanian memiliki peran dalam membuat musim yang konsumtif untuk membangun di bidang ekonomi yang lain. Sektor pertanian menjadi sektor yang menyediakan pangan penduduk, dengan demikian pembangunan pertanian yang cepat dapat memengaruhi ketersediaan pangan yang baik untuk penduduk dan memiliki peranan utama dalam ekonomi masyarakat sebab berhubungan dengan sektor perekonomian yang lain. Sektor pertanian tidak hanya berperan pada ketahanan pangan, namun memiliki pengaruh yang tinggi akan meningkatnya tingkat hidup penduduk dan memberantas kemiskinan, ekonomi regional dan menjadi asal pendapatan. Dengan begitu perolehan pendapatan di sektor ini bisa diukur berdasarkan hasil nilai PDRB yang diperoleh. Tumbuhnya output di sektor ini memengaruhi peluang kerja dalam kurun waktu tertentu di kemudian hari. Situasi ini mengakibatkan adanya ikut serta pemerintah dalam menitikberatkan program pembangunan daerah dalam pertanian yang memiliki potensi mengambil tenaga kerja (Setyabudi, 2005).

Sektor pertanian meliputi usaha dan manfaat benda hidup yang didapat dari alam dan bertujuan dimanfaatkan pribadi maupun diperjualbelikan. Sektor pertanian meliputi sub sektor tumbuhan yang menghasilkan bahan baku, perkebunan perikanan, kehutanan, peternakan dan hasilnya. Sub sektor tanaman yang menghasilkan bahan baku mencakup semua aktivitas yang hasilnya yaitu bahan makanan. Tanaman perkebunan mencakup seluruh aktivitas yang mengeluarkan komoditas tanaman usaha perorangan maupun perusahaan. Peternakan dan hasilnya mencakup seluruh aktivitas membiit dan membudidaya seluruh macam ternak atau unggas yang bertujuan dilakukan pengembangbiakan, pemotongan pengambilan hasilnya yang dijalankan oleh perorangan ataupun perusahaan.

Kehutanan meliputi aktivitas menebang berbagai macam kayu dan mengambil daun, getah, akar dan segala aktivitas memburu. Perikanan meliputi aktivitas menangkap, membenih, membudidayakan berbagai macam ikan dan biota yang lain yang ada di air tawar ataupun asin.

2.1.7 Natural Resources

2.1.7.1 Pengertian Natural Resources

Sumber daya alam yaitu berbagai hal yang asalnya dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan keperluan hidup manusia. Selain komponen biotik misalnya mikroorganisme, tumbuhan dan hewan, terdapat komponen abiotik misalnya tanah, air, logam, gas alam dan minyak bumi. Secara umum, SDA bisa dibagi menjadi 2 berdasarkan sifat, yakni SDA bisa dilakukan pembaharuan dan yang tidak bisa diperbaharui. SDA yang bisa dilakukan pembaharuan yaitu sumber daya yang selalu ada apabila sumber daya tersebut tidak dieksploitasi berlebihan. SDA yang bisa diperbaharui yaitu air, angin, sinar matahari, mikroorganisme, hewan dan tumbuhan. Meskipun berjumlah sangat banyak, namun perlu ada batasan dalam menggunakannya agar tidak langka. Sementara SDA yang tidak bisa diperbaharui di antaranya SDA yang kuantitasnya tidak banyak karena pemakaian yang lebih banyak dibandingkan pembentukannya. Contoh SDA yang tidak bisa diperbaharui misalnya besi, emas, minyak bumi dan jenis tambang lain karena pembentukannya memakan waktu lebih lama sehingga kuantitas yang terbatas. Selain itu, sumber daya alam ada yang bisa berubah dan yang kekal. SDA juga bisa dikelompokkan dari segi jenis, potensi dan sifatnya. (Arisaputra, 2015).

2.1.7.2 Natural Resources Menurut Sifatnya

- a. SDA terbarukan (renewable), yaitu SDA yang bisa mereproduksi dan dapat pulih, seperti tanah, air, mikroorganisme, tumbuhan dan hewan
- b. SDA yang tidak renewable, seperti minyak tanah, gas bumi, batu bara dan bahan tambang lain.

c. SDA yang tidak habis, seperti energi laut, pasang surut, energi matahari dan udara.

2.1.7.3 Natural Resources Berdasarkan Potensinya

a. SDA materiil yaitu SDA yang digunakan berdasarkan bentuk fisik, seperti serat kapas, kayu, emas, es, batu dan lainnya.

b. SDA energi, yaitu SDA yang digunakan berdasarkan energi yang dikeluarkan, seperti sinar matahari, air terjun, gas bumi, minyak bumi, batu bara dan sebagainya.

c. SDA ruang, yaitu SDA yang berbentuk ruang ataupun tempat hidup, seperti wilayah tanah dan angkasa.

2.1.7.4 Natural Resources Berdasarkan Jenisnya

a. SDA non hayati (abiotik) atau SDA fisik yaitu SDA yang berbentuk benda mati seperti air, tanah, bahan tambang, dan sebagainya.

b. SDA hayati (biotik) yaitu SDA yang berbentuk benda hidup, seperti manusia, mikroorganisme, tumbuhan dan hewan. Pasal 1 Ayat 9 UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebut SDA yaitu indikator lingkungan hidup yang mencakup SDA hayati dan non hayati dan seluruhnya menjadi kesatuan ekosistem.

2.1.7.5 Pertambangan Minyak dan Gas

Berlandaskan UU RI No. 22 Tahun 2001 mengenai Minyak Dan Gas Bumi mengartikan minyak bumi yaitu perolehan dari prosesi alamiah seperti hidrokarbon yang berkondisi tekanan dan temperatur atmosfernya berbentuk fasa cair ataupun padat, seperti ozokerit atau lilin mineral, aspal dan bitumen yang didapat dari prosesi tambang, namun di luar dari batu bara dan endapan hidrokarbon lainnya dengan bentuk padat yang didapat dari aktivitas yang bukan berhubungan dari aktivitas penjualan Minyak dan Gas Bumi. Gas bumi berasal dari proses alamiah dari hidrokarbon yang keadaan tekanan serta temperatur atmosfernya seperti fasa gas yang didapat dari proses tambang gas bumi dan minyak.

2.1.7.6 Pertambangan Mineral dan Batubara

Menurut No. 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral Dan Batubara, penambangan yakni semua atau bagian kecil tahap aktivitas untuk mengelola dan pengusaha mineral ataupun batu bara yang mencakup penjualan, pengangkutan, pemanfaatan, pengembangan, pemurnian, pengolahan, penambangan, konstruksi, studi kelayakan, eksplorasi, pengujian umum, dan aktivitas pasca tambang. Mineral yaitu senyawa non organik yang dibentuk secara alamiah dengan sifat khusus dan teraturinya susunan kristal atau gabungan yang menciptakan batuan lepas maupun menyatu. Batu bara yaitu endapan senyawa organik karbonan yang dibentuk dengan cara alami dari berbagai macam tumbuhan. Tambang mineral yaitu sekumpulan mineral yang ditambang dengan bentuk biji ataupun bebatuan, selain air tanah, minyak, gas bumi atau panas bumi. Tambangan batu bara yaitu endapan karbon dalam bumi ditambang, misalnya batuan aspal, gambut, dan bitumen padat.

2.2 Tinjauan Empiris

Disajikan sejumlah temuan sebelumnya yang pernah dianalisis dalam membahas terkait PDRB, tenaga kerja, , sektor pertanian, *natural resources* dan kapasitas fiskal daerah, ditampilkan pada tabel ini:

Tabel 5. Tinjauan Empiris

No	Peneliti	Judul	Variabel Dan Teknis Analisis	Hasil
1	Atria Tiffany Widyarningsih (2018)	“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Kota Pontianak”	Kapasitas fiskal daerah, PDRB, retribusi dan pajak daerah. Bermetode Two Stage Least Squares	Berdasarkan Hasil Persamaan Regresi, Pajak Daerah dengan Rasio Daerah memengaruhi Negatif Terhadap Kapasitas Fiskal. PDRB memengaruhi Positif Terhadap Kapasitas Fiskal.

No	Peneliti	Judul	Variabel Dan Teknis Analisis	Hasil
2	Dewi Adhityarani Musaidah, Ida Ayu Purba Riani, Elsyan R. Marlissa (2018)	“Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Dan Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Kapasitas Fiskal Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Provinsi Papua”	Kapasitas fiskal belanja pemerintah daerah, investasi dan PDB, pemerintah daerah pengeluaran dan apasitas fiskal. Two Stage Least Square	Hasilnya Menunjukkan Kapasitas Fiskal, Belanja Pemerintah Daerah, Investasi Asing, Domestik, Investasi, Dan Penduduk Secara Bersamaan Signifikan Terhadap PDRB Daerah. Model Kedua, Kapasitas Fiskal PDRB, Pajak Daerah, Dan Retribusi Daerah, Bersamaan Signifikan pada Kapasitas Fiskal
3	Nurul Adha, Halim Usman, Haedar. (2020)	“Pengaruh Sumber Daya Alam, Jumlah Tenaga Kerja Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kota Palopo”	Kemandirian keuangan daerah, masyarakat, tenaga kerja, SDA. Regresi Linear Berganda.	SDA, Tenaga Kerja, Penduduk, memengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah
4	Erlina Rufaidah , Dwi Wulan Sari (2013)	“Analisis Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian Dan Hubungannya Dengan Kesempatan Kerja Serta Distribusi Pendapatan Di Provinsi Sumatera Selatan”	PDRB dan peluang Kerja Di Provinsi Sumatera Selatan, 2) Analisis dampak Dari Rasio Output Di bidang Pertanian Dengan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Sumatera Selatan	PDRB bidanh perikanan, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan tanaman pangan memengaruhi signifikan peluang kerja di bidang pertanian Provinsi Sumatera Selatan.

No	Peneliti	Judul	Variabel Dan Teknis Analisis	Hasil
5	Vera Lisna, Bonar M. Sinaga, Muhammad Firdaus, Slamet Sutomoa (2013)	“Dampak Kapasitas Fiskal Terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan”	Kapasitas Fiskal, Pdrb, Kemiskinan Model Persamaan Simultan Dinamis Diestimasi Bermetode Two Stage Least Squares	Naiknya kapasitas fiskal dalam pajak daerah dan bagi hasil pajak memengaruhi turunnya kemiskinan khususnya dari keluarga pertanian yang mayoritas menjadi masyarakat miskin di Indonesia.
6	Lindiani, A, Bachri, F, Saleh, M. S. (2006).	“Analisis Pengaruh Sektor Pertambangan Dan Penggalian Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin”	PDRB Sektor Pertambangan , PSRB Sektor Penggalian Dan Pendapatan Asli Daerah. Metode Regresi Sederhana.	Mendapat hasil tumbuhnya bidang pertambangan memengaruhi positif signifikan pada PAD Kabupaten Musi Banyuasin.
7	Ahmad Khsanatul Ikhsan, Ariusni, Dan Dewi Zaini Putri (2019)	“Analisis Pengaruh Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, Dan Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia”	Pendapatan bidang insdustri, pertambangan, pertanian, Ketimpangan Distribusi Pendapatan. Model Regresi Panel.	Pendapatan Sektor Pertambangan tak memengaruhi Signifikan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia
8	Triswan Suseno (2019)	“Analisis Dampak Sektor Pertambangan Mineral Logam Terhadap Produk Domestik Bruto”	PDB, PDB Sektor Pertambangan Batubara, Logam Dan Penggalian. Regresi Linear Berganda.	Temuannya membuktikan kecilnya pengaruh di sektor tersebut dan tidak memengaruhi signifikan pada meningkatnya PDB.

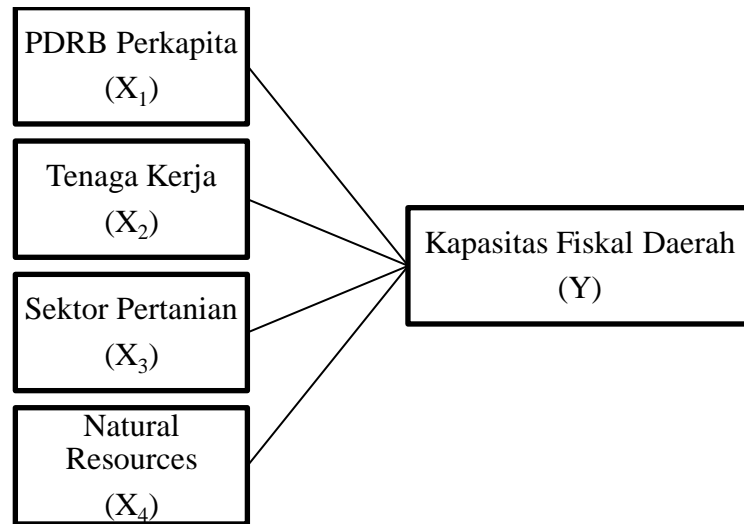
No	Peneliti	Judul	Variabel Dan Teknis Analisis	Hasil
9	Hermawan, Hardy R (2014)	“Pengaruh Sektor Pertambangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia”	Variabel terikatnya yakni tumbuhnya PDRB dan variabel bebasnya yakni proporsi surplus anggaran terhadap anggaran, rerata durasi sekolah, indeks demokrasi dan bidang pertambangan.	Temuannya membuktikan bidang pertambangan memengaruhi positif negatif signifikan Nilai IPM Di Provinsi-Provinsi Di Indonesia.
10	Ariasih, Pande, I. Mande Suyana Utama, and I. G. A. P. Wirathi. (2013)	“Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB per Kapita terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010.”	Banyaknya masyarakat, keuangan daerah mandiri, BBNKB, PKB, dan PDRB perkapitan.	Angka masyarakat dan PDRB perkapita memengaruhi positif signifikan pada PKB dan BBNKB. Angka masyarakat dan PDRB perkapita memengaruhi keuangan daerah yang mandiri dengan menerima PKB dan BBNKB.

Perbedaan analisis ini dengan temuan terdahulu yakni penggabungan berbagai ide temuan sebelumnya yang di kumpulkan dan di perbaharui baik dari segi lokasi penelitian, waktu penelitian, dan variabel bebas yang digunakan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat dari landasan teori dan analisis yang diajukan terdahulu. Menurut UUNo 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pasal 28 ayat 3 Kapasitas fiskal Daerah menjadi sumber dana wilayah yang asalnya dari PAD dan Dana Bagi Hasil. Tumbuhnya perekonomian sebuah wilayah atau PDRB menunjukkan gambaran ekonomi yang ada di sebuah wilayah. Tingginya tingkatan PDRB menggambarkan tingginya kemakmuran penduduk di daerah tersebut. Meningkatkan PDRB akan memengaruhi pendapatan asli daerah yang juga meningkat. PDRB yang tinggi akan menggambarkan tingginya kemakmuran penduduk di daerah tersebut (Putri, 2014). Angka pekerja memengaruhi signifikan kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut serupa dengan temuan Putri (2017) yang menyebut angka pekerja memengaruhi signifikan keuangan daerah yang mandiri.

Tingginya pendapatan pemerintah daerah dapat menaikkan keuangan daerah yang mandiri. PDRB sektor pertanian (perikanan, kehutanan, peternakan, perkebunan dan tanaman pangan) memengaruhi signifikan terhadap kesempatan kerja yang artinya berpengaruh dalam peningkatan perekonomian suatu daerah (Raufidah dan Sari, 2005). Jolianis (2014) dalam temuannya menyebut SDA memengaruhi positif pada penerimaan daerah. SDA yang ada di suatu wilayah dapat menetapkan tingkatan penerimaan daerah. SDA yang menjadi sumber penerimaan di setiap daerah menunjukkan bahwa SDA dalam suatu wilayah tersebut memengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

2.4 Hipotesis

- 2.4.1 Diduga variabel PDRB memengaruhi positif kapasitas fiskal daerah di Sumatera.
- 2.4.2 Diduga variabel tenaga kerja memengaruhi positif kapasitas fiskal daerah di Sumatera.
- 2.4.3 Diduga variabel sektor pertanian memengaruhi positif kapasitas fiskal daerah di Sumatera.
- 2.4.4 Diduga variabel *natural resources* memengaruhi positif kapasitas fiskal daerah di Sumatera.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Analisis yang dilakukan dan digunakan secara deskriptif yang pendekatannya kuantitatif yakni guna melakukan analisis dan melihat pengaruh sektor pertanian, PDRB, tenaga kerja dan Natural Resources terhadap kapasitas fiskal daerah di Sumatera .

3.2 Populasi dan Waktu Penelitian

Populasi yang dianalisis yaitu semua pemerintah kabupaten/kota Sumatera. Banyaknya pemerintah kabupaten/kota Sumatera yaitu 154 dan waktu penelitian tahun 2019.

3.3 Data dan Sumber Data

Analisis yang peneliti lakukan yaitu kajian yang menganalisis dan mengetahui pengaruh sektor pertanian, tenaga kerja, PDRB dan Natural Resources pada kapasitas fiskal daerah di Sumatera. Pada analisis ini digunakan data kuantitatif yakni data sekunder yang didapat dari BPS. Penggunaan data ini didapat dari data crossection, dimana semua data didapat langsung dari BPS dan bersumber dari media daring yang bisa membantu melengkapi analisis ini. Analisis ini menggunakan data Kapasitas Fiskal Daerah , tenaga kerja, sektor pertanian dan Natural Resources.

Tabel 6. Variabel Penelitian

Variabel	Satuan Pengukuran	Simbol	Periode	Sumber Data
Kapasitas Fiskal Daerah	Ribu Rupiah	KFD	Tahunan	BPS
PDRB	Milyar Rupiah	PDRB	Tahunan	BPS
Sektor Pertanian	Persen	SP	Tahunan	BPS
Tenaga Kerja	Ribu Jiwa	TK	Tahunan	BPS
<i>Natural Resources</i>	1 dan 0	D1	Tahunan	ESDM

Sumber : *Eviews 10 diolah tahun 2022*

3.4 Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Kapasitas Fiskal Daerah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No. 126/PMK.07 /2019 yang dimaksud Kapasitas Fiskal Daerah yaitu kesanggupan keuangan setiap wilayah yang tercermin dalam pendapatan daerah dikurang pendapatan penggunaan yang telah ditetapkan dan belanjanya. Analisis ini memanfaatkan data kapasitas fiskal daerah yaitu realisasi pendapatan daerah dikurang pendapatan penggunaan yang telah ditetapkan dan dibelanjakan semua kabupaten/kota di Sumatera . Data berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan , BPS dan statistik keuangan daerah yang diolah dan satuan ukurnya adalah ribu rupiah. Berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan RI No.126/PMK.07 /2019 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dengan maksudnya adalah:

$KFD = \text{Pendapatan [Pendapatan yang Keterangan pemakaiannya telah ditetapkan]} + \text{belanja tertentu}$

Keterangan :

Pendapatan sebagaimana yang dimaksud mencakup:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Pendapatan lainnya yang valid

Pendapatan yang penggunaan telah ditetapkan tersebut mencakup:

- a. Dana desa

- b. Dana otonomi khusus
- c. Dana alokasi khusus fisik
- d. Dana alokasi khusus bukan fisik
- e. Dana bagi hasil SDA
- f. Dana reboisasi
- g. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau
- h. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok

Dana Alokasi Khusus bukan fisik yaitu berbeda dengan Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah.

Belanja tertentu mencakup:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Bunga
- c. Belanja Hibah untuk Daerah Otonom Baru
- d. Belanja Bagi Hasil
- e. Alokasi Dana Desa

3.4.2 Produk Domestik Regional Bruto

Definisi Produk Domestik Regional Bruto yaitu angka nilai tambah bruto yang muncul di semua bidang ekonomi di sebuah daerah. Nilai tambah yaitu nilai yang ditambah dengan gabungan faktor produksi dengan bahan baku prosesi produksi. Data PDRB yang dimanfaatkan untuk dianalisis yakni PDRB harga berlaku semua kabupaten/kota di Sumatera 2019 yang didapatkan melalui BPS.

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Keterangan

Y : Pendapatan Nasional

C : Konsumsi Pemerintah

I : Investasi

G : Pengeluaran Pemerintah

X : Ekspor

M : Impor

3.4.3 Tenaga Kerja

UU RI No 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang dimaksud Tenaga kerja yaitu masing-masing individu yang bisa bekerja agar menciptakan produk maupun jasa untuk pemenuhan kebutuhannya sendiri ataupun untuk penduduk. Tenaga kerja menjadi suatu unsur produksi yang dimanfaatkan untuk memproduksi dan menjadi unsur utama dalam tumbuhnya perekonomian. Saat tenaga kerja ikut serta dalam proses memproduksi, tenaga kerja akan mendapat upah sebagai bayaran atas jasanya (Taryoko, 2016). Data tenaga kerja yang dimanfaatkan yaitu masyarakat yang usianya di atas 15 tahun dan sudah bekerja minimal 1 minggu di kabupaten/kota di Sumatera 2019 yang diperoleh melalui badan pusat statistik.

3.4.4 Sektor Pertanian

Pengertian PDRB sektor pertanian adalah suatu pendapatan dan sumber keuangan yang diperoleh dari sektor pertanian. Data yang digunakan untuk menganalisis yaitu rasio PDRB sektor pertanian terhadap total PDRB kabupaten/kota di Sumatera 2019 yang didapat melalui badan pusat statistik.

$$\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian}}{\text{PDRB Total}} \times 100$$

3.4.5 Natural Resources

Sumber daya alam yaitu berbagai hal yang asalnya dari alam dan bisa dipergunakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Tidak serta merta komponen biotik saja misalnya mikroba, tumbuhan dan hewan, namun juga komponen abiotik misalnya tanah, air, gas alam, minyak bumi, dan bermacam-macam logam. SDA yang dimanfaatkan untuk dianalisis yaitu pertambangan migas, batubara dan mineral logam yang ada di kabupaten/kota di Sumatera 2019. Data diperoleh melalui kementrian ESDM dengan mengakses aplikasi ESDM *One*

Map. Data yang digunakan untuk variabel natural resources adalah data dummy dengan keterangan sebagai berikut :

1 : Daerah kabupaten/kota yang mempunyai sumber daya alam minerba atau migas.

0 : Daerah kabupaten/kota yang tidak mempunyai sumber daya alam minerba atau migas.

3.5 Metode Analisis Data

Guna melihat pengaruh PDRB perkapita dan Natural Resource terhadap Indeks Kapasitas Fiskal Daerah , maka analisis memanfaatkan regresi linier berganda. Analisis regresi ini bertujuan mendapat penggambaran tentang korelasi antara variabel bebas dengan terikat untuk kinerjanya di setiap perusahaan secara simultan ataupun parsial. Analisis regresi berganda yaitu analisa mengenai korelasi 1 (satu) variabel terikat dengan minimal 2 (dua) variabel bebas. Pada analisis ini, unsur yang memengaruhi kapasitas fiskal yaitu PDRB, tenaga kerja, sektor pertanian dan natural resources.

Persamaannya dapat ditulis sebagai berikut :

$$\log KFD = \beta_0 + \beta_1 \log PDRB + \beta_2 \log TK + \beta_3 SP + \beta_4 D + \mu$$

Keterangan :

KFD : Kapasitas Fiskal Daerah

PDRB : PDRB Harga Berlaku

TK : Tenaga Kerja

SP : Sektor Pertanian

D : *Natural Resources*

β_0 : Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien Regresi

μ : *Error term*

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik menjadi suatu syarat menganalisis regresi guna melihat perolehan regresi yang ada menjadi hasil estimasi yang paling tepat dan sesuai untuk dilakukan analisis.

3.5.1.1 Uji Normalitas

Pendapat ekonom Widarjono (2018) menyebut tujuan uji normalitas yaitu pengujian kenormalan residual hasil regresi. Dalam melihat kenormalan data dapat dilakukan pengujian Jarque-Bera, dengan berdasarkan sampel besar yang diduga memiliki sifat *asymptotic*. Apabila residual berdistribusi normal, artinya nilai statistik Jarque-Bera berjumlah nol.

H_0 : Residu disebar normal

H_a : Residu disebar tidak normal.

- a. Apabila nilai probabilitas ρ dari statistik Jarque-Bera tinggi atau tidak signifikan, artinya hipotesis yang menyebut residual berdistribusi normal tidak bisa ditolak sebab nilai statistik Jarque-Bera dekat dengan nol (Widarjono, 2018).
- b. Apabila nilai probabilitas ρ dari statistik Jarque-Bera rendah atau signifikan, artinya hipotesis yang menyebut residual berdistribusi normal dapat ditolak sebab nilai statistik Jarque-Bera berbeda dengan nol (Widarjono, 2018).

3.5.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Definisi uji heteroskedestisitas menurut Widarjono (2018) adalah pengujian heteroskedastisitas berhubungan dengan variabel pengganggu memiliki variasi yang heteroskedastisitas. Langkah yang dipakai untuk melihat kandungan unsur heteroskedastisitas dalam model regresi dengan metode *Glejser*, yakni meregresi nilai absolut dengan variabel bebasnya. Syarat menguji heteroskedastisitas yaitu :

- a. Apabila probabilitas $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ tidak signifikan secara statistik artinya tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas.

- b. Apabila probabilitas $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ signifikan secara statistik artinya terdapat permasalahan heteroskedastisitas.

3.5.1.3 Deteksi Multikolinieritas

Widarjono (2018) mengatakan faktor pertama munculnya permasalahan multikolinieritas yaitu juga model regresi memiliki tingginya *standard error* dan rendahnya nilai statistik t . Asumsi klasik menunjukkan tidak terdapat korelasi *exact collinearity* pada variabel terikatnya. Suatu metode yang dimanfaatkan untuk pendeteksian keberadaan multikolinieritas yakni melakukan perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil estimasi.

3.5.1.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi yaitu keberadaan korelasi pada setiap anggota pengamatan yang berainan waktu. Tujuan dari pengujian ini yaitu melihat keberadaan korelasi pada model regresi linier dan kesalahan gangguan dalam periode $t-1$ (sebelumnya). Apabila ada korelasi, dengan demikian terbilang permasalahan autokorelasi (Ghozali, 2013). Pada analisis ini, pengujian untuk mengetahui gejala autokorelasi dengan menguji Durbin-Watson (DW test).

Tabel 7. Durbin Watson

Nilai Statistik d	Keterangan
$0 < d < d_l$	Menolak Hipotesis 0, terdapat autokorelasi positif
$d_l \leq d \leq d_u$	Wilayah ragu-ragu, tidak terdapat keputusan
$d_u < d < 4-d_u$	Gagal menolak hipotesis 0, tidak terdapat autokorelasi
$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$	Wilayah ragu-ragu, tidak terdapat keputusan
$4 - d_l < d < 4$	Menolak Hipotesis 0, ada autokorelasi negatif

3.5.2 Pengujian Hipotesis

Unsur penting dalam menguji ekonometrika yaitu menguji hipotesis. Uji ini bermanfaat untuk menarik simpulan analisis. Di sisi lain, pengujian ini dimanfaatkan guna melihat data yang akurat. Untuk menguji hipotesis, ada tidak bentuk uji yang dilaksanakan, di antaranya uji signifikansi parameter individual (uji t), signifikansi simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2).

3.5.2.1 Uji t

Gujarati (2007) menyebut pengujian signifikansi parameter individual (uji t statistik) memperlihatkan korelasi variabel bebas dengan individual pada variabel terikat. Hipotesis yang dipakai yaitu menguji hipotesis koefisien regresi melalui uji signifikansi parameter individu pada tingkatan kepercayaannya 99%, 95%, dan 90% derajat kebebasannya [$df = (n-k)$].

Uji tersebut berlandaskan nilai positif ataupun negatif. Syarat menguji yaitu:

- H_0 ditolak dan H_a di terima, bila $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$

- H_0 diterima dan H_a ditolak, bila $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$

Apabila H_0 ditolak, dengan demikian variabel bebas yang diujikan memengaruhi signifikan variabel terikatnya. Apabila H_0 diterima artinya variabel bebas yang diujikan memengaruhi signifikan pada variabel terikat. Dalam analisis, uji-t yaitu berikut:

a. PDRB

$H_0 : \beta_1 = 0$, PDRB tidak berpengaruh pada kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Sumatera.

$H_a : \beta_1 > 0$, PDRB memengaruhi positif dan signifikan pada kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Sumatera.

b. Tenaga Kerja

$H_0 : \beta_2 = 0$, Tenaga Kerja tidak berpengaruh pada kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Sumatera.

$H_a : \beta_2 > 0$, Tenaga Kerja memengaruhi positif dan signifikan pada kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Sumatera.

c. Sektor Pertanian

$H_0 : \beta_2 = 0$, Sektor Pertanian tidak berpengaruh pada kapasitas fiskal daerah di kabupaten/kota Sumatera.

$H_a : \beta_2 > 0$, Sektor Pertanian memengaruhi positif dan signifikan pada kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Sumatera.

d. Natural Resources

$H_0 : \beta_2 = 0$, Natural Resources tidak berpengaruh pada kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Sumatera.

$H_a : \beta_2 > 0$, Natural Resources memengaruhi positif dan signifikan pada kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Sumatera.

3.5.2.2 Uji F

Gujarati (2007) mengatakan pengujian signifikansi simultan (uji F) dilaksanakan guna melihat adanya dampak signifikan dengan bersamaan semua variabel bebas pada variabel terikat. Uji hipotesis secara bersamaan menguji statistik F dengan tingkat kepercayaannya 95% dan derajat kebebasannya ($df_1 = (k-1)$) dan ($df_2 = (n-k-1)$). Rumusan hipotesisnya yaitu:

$H_0 : \beta_1; \beta_2; \beta_3; \beta_4 = 0$, keseluruhan variabel bebas secara bersamaan tidak memengaruhi signifikan variabel terikatnya.

$H_a : \beta_1; \beta_2; \beta_3; \beta_4 \neq 0$, minimal satu variabel bebas memengaruhi signifikan variabel terikatnya.

Syarat pengujian yaitu:

H_0 ditolak dan H_a diterima, apabila $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$.

H_0 diterima dan H_a ditolak, apabila $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$.

3.5.2.3 Pengujian Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) memiliki tujuan guna melihat sejauh apa variabel bebas bisa menerangkan secara tepat varian variabel terikat atau guna menghitung baiknya sebuah model. Koefisien Determinasi (R^2) yaitu jumlah yang memberi persentasi varian total pada variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebasnya (Gujarati, 2010). Koefisien determinasi (R^2) bernilai 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Tingginya angka koefisien determinasi membuktikan besarnya variasi variabel bebas berbentuk variabel terikat. Nilai R^2 yang paling tinggi ialah satu, yakni jika semua variasi dependen bisa diterangkan seluruhnya oleh variabel independen dalam model.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari temuan analisis data dan pembahasan, diperoleh beberapa simpulan, di antaranya:

1. PDRB memengaruhi positif signifikan Kapasitas Fiskal di Sumatera. Hal tersebut berarti apabila PDRB naik dengan asumsi *ceteris paribus* maka Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota di Sumatera atau kemampuan keuangan daerah juga ikut meningkat.
2. Tenaga kerja memengaruhi positif dan signifikan pada Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera. Hal tersebut artinya apabila angka penduduk yang bekerja meningkat dengan asumsi *ceteris paribus* maka Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota di Sumatera atau kemampuan keuangan daerah juga ikut meningkat.
3. Sektor pertanian memengaruhi signifikan pada kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Sumatera. Hal ini berarti jika sektor pertanian meningkat dengan asumsi *ceteris paribus* maka Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota di Sumatera atau kemampuan keuangan daerah juga ikut meningkat.
4. Pengaruh *natural resources* terhadap Kapasitas Fiskal di Sumatera adalah positif dan signifikan. Hal ini berarti jika suatu daerah kabupaten/kota di Sumatera mempunyai *natural resources*/sumber daya alam maka daerah tersebut memiliki kapasitas fiskal daerah yang melebihi daerah yang tidak mempunyai *natural resources*/sumber daya alam. Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pasal 28 ayat 3 Kapasitas fiskal Daerah menjadi

sumber dana Daerah dari PAD dan Dana Bagi Hasil. Jadi daerah yang memiliki pertambangan atau aktifitas pertambangan yang banyak bisa memberikan kontribusinya kepada pendapatan dan keuangan daerah melalui dana bagi hasil nonpajak atau SDA.

5.2 Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan PDRB dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerah karena pembangunan ekonomi sebuah wilayah memerlukan dana yang didapat dari beberapa sumber yang diatur daerah. Pada otonomi daerah, pembangunan perekonomian sebuah wilayah dilaksanakan berlandaskan kesanggupan pendapatan daerah sebab hak dari pengolahan sumber keuangan daerah dan pembangunan perekonomian sudah diberikan ke Pemerintah Daerah yakni Pemerintah Kabupaten dan Kota.
2. Pemerintah harus meningkatkan tingkat tenaga kerja dengan cara membuka lapangan pekerjaan dan menambah tenaga kerja yang produktif, karena peningkatan tenaga kerja akan mempengaruhi output barang dan jasa yang dihasilkan. Peningkatan barang dan jasa akan menambah pendapatan daerah.
3. Pemerintah daerah harus meningkatkan penerimaan dari sektor pertanian dengan melakukan peningkatan produksi dan produktivitas produk pertanian serta menjaga stabilitas harga dan daya saing pemasar produk pertanian.
4. Pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam melalui aktifitas tambang yang ada di semua kabupaten/kota di Sumatera. Namun pemerintah juga harus memperhatikan aktifitas pertambangan agar tidak merugikan ekosistem dan sosial masyarakat.
5. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel dan menambahkan wilayah analisis serta memanfaatkan metode analisis lainnya agar menghasilkan temuan yang lebih baik lagi untuk penyempurnaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P.H. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Interdisipliner Kritis Uksw*. Vol. 1, No. 20.
- Adha, N. 2020. *Pengaruh Sumber Daya Alam, Jumlah Tenaga Kerja Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kota Palopo (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Palopo)*.
- Ariasih, Pande, I. 2013. Mande Suyana Utama, and I. G. A. P. Wirathi. *Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB per Kapita terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010*. Udayana University.
- Arisaputra, M. I. 2015. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Darmanto, H. C. 2012. *Pengaruh Population, Employment, Size Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*.
- Darwanto Dan Yustikasari, Y. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi 10 Makasar*.
- Desmawati, A., Zamzami, Z., Dan Zulgani, Z. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah. Vol 3. No 11. 49-58*.
- Djakapermana, R. D. 2010. *Pengembangan Wilayah Melalui Pendekatan Kesisteman*. Bogor, Ipb Press.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 19 (Edisi Kelima)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, N. Damodar. 2007. *Dasar-Dassar Ekonometrika Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

- Gujarati, N. Damodar. 2010. *Dasar-Dassar Ekonometrika Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. 2001. *Anggaran Daerah Dan Fiscal Stress : Sebuah Studi Kasus Pada Anggaran Daerah Provinsi Di Indonesia*. Jebi Vol. 16. No. 4.
- Halim, A. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Upp Amp Ykpn.
- Halim, A. 2009. *Problem Desentralisasi Dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusatdaerah: Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Sekolah Pascasarjana Ugm, Yogyakarta.
- Halim, A Dan Syukriy, A. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Dan Bali*. Simposium Nasional Akuntansi Vi, 1140-1159.
- Handayani, A. 2009. *Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah Dan Upaya Pajak (Tax Efort) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Hidayat, W., Rustiadi, E., dan Kartodihardjo, H. 2014. *Dampak Sektor Pertambangan Terhadap Perekonomian Wilayah Di Kabupaten Luwu Timur*. *Jurnal Economia*, Vol. 10.No. 1, 65-80.
- Ikhsan, A. K., Ariusni, A., Dan Putri, D. Z. 2019. *Analisis Pengaruh Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, Dan Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia*. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 731-738.
- Junaidi, J., & Hardiani, H. (2009). *Dasar--Dasar Teori Ekonomi Kependudukan*.
- Jolianis. 2014. *Pengaruh Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Penerimaan Daerah*. *Journal Of Economic And Economic Education Vol. 3. No. 1.42-52*.
- Khusaini, M. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal Dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPF E Unibraw.
- Lestari, A. A. P. 2017. *Peranan Sektor Basis Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun*. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 6(1), 23-32.
- Lisna, V., Sinaga, B. M., Firdaus, M., Dan Sutomo, S. 2013. *Dampak Kapasitas Fiskal Terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 14, No. 1 :1-26.

- Litvack. 1999. *Private Demands For Public Goods*. *American Economic Review*, Vol. 63. No.3. 280-96.
- Lindiani, A., Bachri, F. Dan Saleh, M. S. (2006). *Analisis Pengaruh Sektor Pertambangan Dan Penggalian Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin*. *Doctoral Dissertation, Sriwijaya University*.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mirsan, M. A., Hamzah, N., dan Sjufri, M. 2019. *Pengaruh Investasi, Pdrb Perkapita Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Derajat Kemandirian Fiskal*. (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Selatan). *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 2. No. 2, 82-98.
- Musaidah, D. A., Purba Riani, I. A., dan Marlissa, E. R. 2018. *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Dan Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Kapasitas Fiskal Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Provinsi Papua*. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol. 3. No. 1.
- Oates, W.E. 1972. *Fiscal Decentralization And Economic Development*. *National Tax Journal*. Vol. 46.
- Putri, T. K. 2014. *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Jember*.
- Putri, D. N. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2015* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Pramandari, P. Y. 2014. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali*. *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol 4. No. 2.
- Prana, R.R. 2019. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi*. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol. 4. No.1.
- Puspitasari, N., Adiputra, I. Dan Sulindawati, N. 2015. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening* (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Undiksha*. Vol. 3. No. 1.
- Rufaidah, E., dan Sari, D. W. 2013. *Analisis Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian Dan Hubungannya Dengan Kesempatan Kerja Serta Distribusi Pendapatan Di Provinsi Sumatera Selatan*. *Jurnal Studi Sosial/Journal Of Social Studies*, Vol. 1. No. 4.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 28 Ayat 3 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 27 Ayat 3 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/Pmk/07/2019 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.*

Retnoningsih, D. U. 2019. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik regional Bruto Per Kapita, Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2017.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 9 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.*

Republik Indonesia . *Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Pasa 4 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Pengusahaan Tanah-Tanah Negara.*

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 40 Ayat 2 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.*
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.*
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 9 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.*
- Rufaidah, E., dan Sari, D. W. 2013. *Analisis Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian Dan Hubungannya Dengan Kesempatan Kerja Serta Distribusi Pendapatan Di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Studi Sosial/Journal Of Social Studies, Vol. 1. No. 4.*
- Saragih, J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia.*
- Setyabudi, H. 2005. *Pengaruh Pertumbuhanpdrb Terhadap Elastisitas Kesempatankerja Di Sumatera Selatan (Doctoral Dissertation, Tesis. Program Pascasarjana. Unsri. Palembang).*
- Taryoko. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2013 Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2016.*

- Suseno, T. 2019. *Analisis Dampak Sektor Pertambangan Mineral Logam Terhadap Produk Domestik Bruto. Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara, Vol.15. No. 2. 133-144.*
- Widyaningsih, A. T. 2018. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Kota Pontianak. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan (Jebik). Vol. 7. No. 3. 215-237.*
- Widarjono, A. 2018. *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya. Yogyakarta: Penerbit Ekonosia.*